

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tibet merupakan wilayah otonomi China komunis yang terbelah cukup jauh dari pusat kota Beijing. Tibet sendiri merupakan wilayah dunia yang misterius dan terpencil karena pegunungan-pegunungan tinggi yang mengelilinginya. Dibalik kemisteriusannya, Tibet menyimpan konflik yang berkepanjangan bahkan masyarakat asli Tibet yang pro-demokrasi menuntut untuk menjadi sebuah negara yang independen, Karena otonomi yang dijanjikan oleh pemerintah China tidak kerap mengabaikan permintaan tersebut karena banyaknya berbagai pertimbangan. Pada tanggal 10 Maret 2008 di Lasha dalam memperingati 54 tahun perjuangan rakyat Tibet untuk lepas dari pendudukan Tiongkok, Para kelompok aksi pro demokrasi melakukan demonstrasi damai untuk penuntutan Tibet merdeka. Kelompok demonstrasi yang awalnya berjalan damai berubah menjadi tindakan radikal dengan kerusuhan yang terjadi dimana-mana. Mulai dari pembakaran dan penjarahan yang terjadi terhadap etnis yang bukan berasal dari Tibet. Bahkan akhirnya aksi ini mengarah pada aksi serangan terhadap orang yang tidak beretnik Tibet pada tanggal 14 maret 2008 akibat mendapat perlawanan keras dari pemerintahan di Tiongkok (Cheng, p. 2005)

Dalam sejarahnya, Tibet memiliki hubungan baik dengan China semenjak masa Dinasti Tang yang berawal dari hubungan pernikahan antara seorang jenderal Tibet dengan seorang putri kaisar china. Tibet benar-benar menjadi daerah kekaisaran China pada saat dinasti Qing, tepatnya saat kaisar Kang Shi yang menduduki tahta kekaisaran kala itu. Akan tetapi Tibet pernah menjadi negara independen yang memiliki sebuah fungsi negara normal pada periode tahun 1911-1949. Akan tetapi keberadaan Tibet pada saat itu sebagai sebuah negara tidak diakui, terutama oleh China. Kemudian pada tahun 1950 tentara China memasuki daerah teritori Tibet untuk mengamankan situasi di sana, dimana pada saat itu juga diikuti pemberontakan dari rakyat Tibet yang tidak setuju dengan keputusan

pemerintah China yang akhirnya di tahun 1951 Tibet resmi bergabung dengan Beijing.

Masalah pelanggaran hak asasi manusia di Tibet telah lama dikhawatirkan organisasi-organisasi hak asasi manusia di dunia. Pada tahun 1960, Komisi Ahli Hukum Internasional menyatakan dalam laporannya bahwa pernyataan China yang "datang untuk membebaskan Tibet tidak beralasan. Menurut para ahli dari organisasi itu, pemerintah China bersalah karena menyalahgunakan hak-hak otonomi pribumi. Pada tahun 1961 PBB juga menuntut agar pemerintah China menghormati hak asasi manusia dalam mengatasi permasalahan di Tibet.

Kemudian PBB juga menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat pribumi di Tibet. Dalam kasus apapun pernyataan meyakinkan para pejabat China bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang telah terjadi, namun pejabat Tibet tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa persetujuan dari China. Hingga semua calon pemimpin Tibet juga dipilih oleh pemerintah China, meskipun semua calon berasal dari penduduk pribumi. Dalam hal ini pemilihan umum yang dilakukan bebas di wilayah Tibet hanya sekedar formalitas. Akhirnya melalui sebuah perjanjian yang isinya berbunyi bahwa Tibet bersedia untuk bergabung dengan China, apabila pemerintah China memberikan otonomi khusus kepada Tibet. Akan tetapi keputusan hak otonomi itu baru diberikan oleh Beijing pada tahun 1965, setelah berbagai demonstrasi yang terjadi di Tibet.

Selama dua puluh tahun terakhir pemberontakan rakyat berulang kali terjadi di wilayah Tibet dan tanpa ampun ditekan oleh China dan Belum lama ini pemerintah China terpaksa membuat konstitusi baru yang membatasi pergerakan (migrasi) seluruh warga Tibet. Dibawah konstitusi baru ini seluruh masyarakat Tibet hanya diperbolehkan beraktifitas hanya dimana mereka terdaftar dan tidak diizinkan untuk berpindah ke daerah lain tanpa memiliki izin khusus dari pemerintah China yang sangat sulit untuk mereka dapatkan. Dalam kasus inilah dimana masyarakat Tibet dipaksa kembali ke desa-desa di mana mereka terdaftar oleh pemerintah China. Dimana sekitar 40.000 masyarakat Tibet dipaksa untuk pindah ke desa-desa mereka selama pemberontakan pada tanggal 5 hingga 7 Maret 1989. (artileri, 2012) Kemudian ditahun berikutnya dalam sebuah program

transmigrasi banyak warga Tibet yang kembali ke desa mereka, hal ini didedikasikan untuk ulang tahun ke-40 bergabungnya Tibet.

Namun seiring bergabungnya Tibet, kebudayaan dan agama yang telah lama dianut oleh masyarakat Tibet secara perlahan terkikis oleh kebijakan pemerintah China dimana di tahun 1990 pemerintah China melakukan penindasan terhadap kecenderungan separatis dan kesetiaan terhadap Dalai Lama karena Pemerintah China menganggap hal tersebut dapat memperlambat penyatuan Tibet ke China.(Carlson, 2012) Konflik yang terjadi antara Tibet dengan pemerintahan China bahkan mengundang perhatian dari seluruh dunia internasional dengan berbagai tanggapan, bahkan wacana mengenai konflik ini terus berkembang dengan berbagai sudut pandang.

Pemerintahan China di Beijing kemudian merespon melalui juru bicara kementerian luar negerinya Shen Guofang yang dalam pernyataannya mister shen memperingatkan kalau masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tibet secara sengaja dibuat menjadi isu untuk mencampuri urusan dalam negeri China, yang mengakibatkan masalah ini akan menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Mister shen juga memberikan pernyataan bahwa Pemerintah China tidak akan menerima penggunaan isu masalah hak asasi manusia tersebut untuk menekan pemerintah China atau dalam mencampuri urusan dalam negerinya. (kompas, 1992) Begitulah respon yang dikeluarkan pemerintah Cina dalam menanggapi kritikan para oposan politik dan aktivis HAM asing, bahwa HAM sebagai keamanan bagi Cina. (Kompas, 1997)

Amerika sebagai negara yang bertujuan untuk menstabilkan keamanan dunia ikut serta dalam memperbaiki HAM di China. Dengan Duta besarnya untuk China Gary Locke menyuarakan bahwa menilai catatan HAM di China memburuk karena rezim komunis China yang terancam dengan munculnya demonstrasi pro-demokrasi. Lalu ia mengatakan bahwa proses penegakan HAM di China sedang mengalami fase naik turun, sehingga proses penegakan HAM itu tampak memburuk. Disinilah AS memberikan sikap terbuka mendukung kaum liberalis China untuk menyuarakan banyaknya pelanggaran HAM di sana.

Dengan The Tibetan Policy Act of 2002 yang dikeluarkan AS sebagai bentuk kebijakan dalam kasus HAM Tibet, dimana pemerintah pusat mengarahkan eksekutif AS untuk melakukan sikap mendorong pemerintah China untuk ikut serta berdialog dengan Dalai Lama atau wakil-wakilnya membahas untuk pembebasan tahanan politik dan agama Tibet di China serta mendukung pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan tujuan lainnya di Tibet dan melaksanakan kegiatan lain demi mendukung aspirasi rakyat Tibet untuk melindungi identitas mereka.

Pada bulan maret 2008 Presiden AS kala itu George W Bush menghubungi Presiden China untuk menyampaikan rasa keprihatinannya pada situasi di Tibet saat ini. Menurut pernyataannya, presiden Bush mendorong agar pemerintah China mau melakukan perundingan dengan Dalai Lama sebagai pemimpin Tibet dan meminta Presiden China Hu Jintao untuk memberikan akses kepada para diplomat dan wartawan asing agar diberikan kemudahan untuk masuk ke Tibet. Di kesempatan waktu yang berbeda, Menlu AS Condoleezza Rice juga mengungkapkan hal yang serupa dengan presiden Bush. Ia mengatakan bahwa kekecewaannya atas tanggapan Pemerintah China terhadap permintaan AS pada September lalu untuk segera bertindak dalam kasus hak asasi manusia (HAM). (harapan, 2008)

Di samping itu Dalai Lama juga menulis surat kepada presiden Cina, Hu Jintao untuk menawarkan pengiriman para utusan ke Tibet untuk menurunkan ketegangan-ketegangan setelah Beijing melakukan penumpasan terhadap para pelaku aksi protes warga Tibet. Dalai lama menyatakan, keprihatiannya yang dalam mengenai situasi (di Tibet) dan menawarkan akan mengirim utusan-utusannya untuk membantu menenangkan situasi dan memberikan pengertian kepada rakyat Tibet, "kata Lodi Gyari" kepada wartawan di Washington. (rosih, 2008)

Kemudian dengan cara persuasif, presiden Bush yang disaat itu sedang berkunjung ke negara komunis untuk ke-tiga kalinya mengungkapkan, "Bahwa pentingnya menumbuhkan kebebasan (Demokrasi) didalam hal politik, sosial, dan agama di negeri tirai bambu (China). Dalam ungkapannya Bush menekankan

bahwa didalam hal kebebasan beragama adalah cara yang terbaik untuk meyakinkan, bahwa kebebasan lainnya akan mengikuti. Kebebasan ini berjalan seiring dengan masyarakat yang mengakui kebebasan beragama juga akan mengakui kebebasan berpolitik. Diakhir penryataannya Presiden Bush berkata, bahwa Presiden Hu adalah rekan yang bijak dan dia akan memeperhatikan apa yang sudah saya kemukakan.(harapan, Bush Hu Jintao: Rundingkan HAM, Perdagangan, Agama,, 2008)

Dalam hal ini Pemerintah China pun menganggap bahwa HAM haruslah mencakup pada kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi, makanya dengan konsep yang dianut oleh China dijadikan sebagai landasan mereka untuk membuat kebijakan yang menurut dunia internasional khususnya Amerika telah melanggar HAM warganya. Ditambah lagi dengan ajaran Konfusianisme yang banyak dianut masyarakat China dan disebut-sebut mempunyai andil yang besar terhadap pola pikir. Namun ajaran Konfusianisme ini tidak memiliki kajian tentang HAM dan kedudukan setiap individu, dimana hal tersebut menjadi nilai utama dalam konsep HAM secara universal.

AS sebagai negara adi kuasa memiliki tujuan dimana setiap manusia mendapatkan hak mereka masing-masing. Terlihat bahwa AS sangat mendukung mereka yang tidak mendapatkan haknya tersebut. Apalagi AS yang menganut sistem liberal mempunyai pandangan yang mengedepankan kebebasan setiap orang. Dengan demikian setiap manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal. Tapi dibalik itu semua pemerintah China memiliki pandangan lain mengenai HAM, Dalam International Human Rights Conventions in China dinyatakan bahwa konsep HAM harus mencakup langkah-langkah kesehatan dan kemakmuran ekonomi, serta standar ekonomi hidup. Dalam budaya konfusianisme dikatakan bahwa harmonisasi dan keamanan nasional akan dicapai melalui penghormatan kepada kelompok, bukan individu. Sehingga China menganggap HAM bukanlah untuk hak individu melainkan hak kelompok dan bersama.

Keberadaan AS sebagai negara yang lebih dahulu besar dan kuat dibanding dengan China, menjadikannya memilih untuk menjalankan pemerintahan dengan

ideologi yang berbeda dengan AS begitu pula dengan masalah HAM. Apa yang dilakukan Amerika sebenarnya merupakan wujud perhatian AS terhadap apa yang dilakukan China. Sementara China sendiri tidak pernah beranggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran, sebab dengan kebijakan yang telah dikeluarkan akan menjadikan China sebagai negara utuh yang memiliki kesamaan dan bangkit bersama-sama. Dalam contoh kasusnya Pemerintah China sering membatasi masuknya wisatawan ke Tibet, seperti yang terjadi pada bulan Juli tahun 2012 lalu, karena ada keprihatinan serius tentang mungkin adanya kerusuhan selama perayaan ulang tahun ke-90 Partai Komunis China.

Kemudian di tahun 2015, para petinggi Partai Komunis China di Tibet mendesak Panchen Lama, tokoh agama tertinggi kedua dalam Buddhisme Tibet, agar menolak kepemimpinan spiritual Dalai Lama, seperti dilaporkan oleh media pemerintah China. Posisi Panchen Lama ke-11 ini kian dilingkupi kontroversi sejak orang lain yang diakui Dalai Lama sebagai titisan dari Khedrup Gelek Pelzang, Panchen Lama pertama, menghilang ketika berusia enam tahun. Buddhisme Tibet meyakini bahwa bila seorang lama, atau guru senior, meninggal dunia, jiwanya menjelma dalam tubuh seorang anak.

Dalai Lama mengakui Gendun Choekyi Nyima, kini 26 tahun, sebagai titisan Panchen Lama. Namun Partai Komunis menolaknya dan memilih Gyaltzen Norbu sebagai reinkarnasi pada 1995. Misteri hilangnya Panchen Lama pilihan Dalai Lama yang amat dirahasiakan oleh China tersebut hanyalah satu dari sejumlah pertentangan seputar Tibet antara China dengan Dalai Lama. Dalai Lama dan Partai Komunis China yang ateistis bukan sekali ini saja bergumul tentang siapa yang berhak menentukan reinkarnasi.

Chen Quanguo, sekretaris Partai Komunis untuk Tibet, mengutarakan harapannya supaya Panchen Lama versi Beijing akan berjalan beriringan dengan partai dan melindungi kesatuan nasional. Menarik garis yang jelas antara Dalai Lama ke-14, dan menolak dengan tegas segala perbuatan separatis dan subversif, Chen menasihati Panchen Lama di kota Shigatse, Tibet, pada peringatan 20 tahunnya. Buddhisme Tibet sedang berada di masa keemasan perkembangannya dalam sejarah. Ulama dan umat menikmati kebebasan agama secara penuh ungkap

harian resmi pemerintah Tibet Daily kala itu yang mengutip ucapan Panchen Lama sebagai pilihan Beijing kepada Chen.

Sementara itu, menurut kepemimpinan Tibet yang diasingkan di India, upaya Beijing yang menghalangi keterlibatan mereka ihwal reinkarnasi tidak punya pijakan moral maupun hukum. Otoritas Beijing atau Partai Komunis China tidak memiliki legitimasi maupun kredibilitas tentang urusan ini. Lobsang Sangay, kepala politik pemerintah terasing Tibet yang kini bermukim di kota Dharamsala India, Dalai Lama melarikan diri ke India usai pemberontakannya gagal melawan pemerintah China. Ia menolak tuduhan kekerasan dan separatisme yang dilontarkan China dan berkata hanya menginginkan otonomi untuk Tibet.

Tak pelak, warga Tibet khawatir bilamana kematian sang pemenang hadiah Nobel perdamaian itu dan suksesnya bakal ditunggangi China untuk memecah belah Buddhisme Tibet, dengan dua Dalai Lama berbeda yang diangkat oleh China dan pemerintahan terasing, Beijing mengklaim bahwa Dalai Lama selanjutnya mesti disetujui oleh mereka. Meski begitu, Dalai Lama saat ini merasa tugas pemimpin spiritual tersebut akan berakhir seiring kematiannya nanti. (Sari, 2015)

Amerika Serikat sebagai negara yang besar tidak ingin dominasinya di dunia tersaingi oleh negara manapun. Hal inilah yang mendasari Amerika untuk melakukan campur tangan dengan alasan kebijakan yang diambil tersebut telah melanggar konsep HAM secara universal oleh pemerintah China terhadap warganya. Dalam hal ini AS mendukung kaum liberalis China untuk menyuarakan banyaknya pelanggaran HAM disana Dan AS siap memberikan bantuan apa saja kepada mereka yang membantunya dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya.

Secara politik, hubungan bilateral AS dan China terus berusaha diupayakan untuk berjalan sesuai kesepakatan yang telah mereka putuskan. Terbukti dengan tetap ada inisiasi dan respon positif kedua negara untuk terus melanjutkan pertemuan dan kongres khusus yang membahas hubungan kedua negara secara

bilateral dengan lebih terbuka. Pergantian pemerintahan di AS pun diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dan mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi.

Banyak contoh kasus campur tangan AS dalam hal serupa baik intervensi yang dilakukan secara politik, kemanusiaan hingga militer. Beberapa contohnya :

1. Intervensi AS di konflik semenanjung Korea secara politik, kemanusiaan hingga militer
2. Intervensi AS secara militer di Lebanon
3. Intervensi AS di Libya
4. Agresi militer AS di Vietnam, Irak, Afghanistan, Sudan dan Palestina
5. Intervensi AS secara politik dan kemanusiaan terhadap para Zionist yang mendiami dan melakukan penjarahan terhadap hak-hak muslim di Palestina.

Namun semua hal yang dilakukan AS selalu menggunakan pengumpulan PBB sebagai tameng untuk bisa turut serta dalam mencampuri urusan internal dengan dalil pelanggaran HAM (Demokrasi) sebagai alatnya. Maka tak bisa dipungkiri bahwa AS pun turut campur tangan didalam konflik yang terjadi antara Tibet dengan China (Kiblat, 2014).

Kunjungan anggota kongres AS ke Tibet ditahun 2015, Pemimpin Minoritas minoritas Nancy Pelosi (D-San Francisco) dan Rep Jim McGovern (D-Mass) tidak takut untuk berbicara tentang apa yang mereka lihat sebagai kebijakan China yang represif di Tibet. Pelosi tahun ini menyampaikan pidato di Gedung DPR yang melakukan kunjungan untuk merayakan ulang tahun ke-80 Dalai Lama yang Beijing menganggap pemimpin Buddhis itu sebagai pembelot. Didalam konferensi pers perihal kunjungan yang dilakukan, McGovern selaku perwakilan mensponsori sebuah RUU yang akan melarang beberapa pejabat China dari Amerika Serikat selama China terus secara signifikan membatasi diplomat Amerika, wartawan dan lainnya dari wilayah Tibet. Banyak yang terkejut akan hal itu dikarenakan tak ada wartawan yang mendampingi di kunjungan tersebut dan juga para anggota parlemen yang melakukan konferensi pers di AS setelah mereka pulang dari sana.

Musim panas ini, Sarah Sewall, koordinator khusus Departemen Luar Negeri untuk masalah Tibet, mengatakan bahwa selama empat tahun terakhir, 35 dari 39 permintaan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar AS atau konsulat untuk mengunjungi Daerah Otonomi Tibet telah ditolak. Namun setelah bertahun-tahun mengalami kekalahan total setelah kerusuhan di tahun 2008, Currie mengatakan, telah terjadi pembukaan yang sangat bertahap sejak 2012, dengan Duta Besar Australia untuk China Frances Adamson mengunjungi pada tahun 2013 dan Duta Besar AS untuk China Max Baucus pada bulan Mei. Jelas dialog itu penting dan ini bisa menjadi langkah awal untuk sesuatu yang lebih jauh kata Paul Golding, mengkoordinasikan koordinator Perhimpunan Tibet yang berbasis di London. Tapi tidak ada yang berubah di lapangan. Ini bukan indikasi perbaikan bagi warga Tibet sendiri. Pelosi mengatakan bahwa dia adalah delegasi kongres AS yang pertama yang memasuki Tibet sejak 2008 dan bahwa kunjungan tersebut berfokus pada isu-isu termasuk hak asasi manusia dan perubahan iklim.

Selain McGovern, anggota delegasi lainnya dari Demokrat adalah Alan Lowenthal dari Long Beach dan Ted Lieu dari Torrance, Betty McCollum dan Tim Walz dari Minnesota, dan Joyce Beatty dari Ohio. (Tibet, 2015) Namun didalam kasus ini pemerintah China telah memperlihatkan sikap ketidaksenangannya terhadap campur tangan AS didalam konflik ini.

I.2 Rumusan Permasalahan

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimana Bentuk Intervensi Amerika Serikat (AS) Dalam Konflik Di Tibet - China Periode 2012 - 2015 ?**

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Beberapa hal yang dapat penulis ajukan sebagai tujuan karya tulis ini, yakni:

1. Mengetahui bagaimana awal dari sejarah konflik yang terjadi antara Tibet dengan China
2. Memahami bagaimana sikap represif China hingga terjadinya pelanggaran HAM didalam konflik Tibet dengan China

3. Menjelaskan bagaimana bentuk Intervensi Amerika Serikat dalam terhadap konflik Hak Asasi Manusi di Tibet - China

Beberapa hal yang dapat penulis ajukan sebagai manfaat dari karya tulis ini,yakni:

1. Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya dalam perspektif dari masalah Hak Asasi Manusia.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi publik, kalangan mahasiswa ilmu hubungan internasional khususnya dan semua kalangan secara umum, serta sumber informasi bagi pemerintah, khususnya dalam masalah Hak Asasi Manusia.

I.4 Tinjauan Pustaka

Didalam Tinjauan Pustaka yang pertama ini, Penulis (Kiki Kartika dan Indra Pahlawan, 2013, dengan judul Respon Tibet terhadap Migrasi Etnis Han yang Dilakukan Oleh Pemerintah China)

Permasalahan antara China dan Tibet erdasar dari permasalahan budaya yang berlawanan yaitu tentang perbedaan antara kepercayaan Buddha yang dianut oleh China dan Buddha Lama. Tibet yang ingin memerdekakan diri dan merasa Tibet layak berdiri sebagai suatu negara jelas-jelas menolak tindakanini. Berbagai cara dilakukan China untuk melancarkan kehendaknya. Pembauran etnis yang mulai dilakukan dengan cara migrasi etnis Han ke Tibet, pembangunan, bantuan-bantuan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dilancarkan China ke Tibet. Pemerintah China sendiri menganggap tindakannya benar demi kemakmuran dan perkembangan Tibet.

Tibet sendiri merasa tindakan yang dilakukan China hanya untuk menguasai Tibet dan ingin menghancurkan budaya dan agama Tibet. Tidak hanya cara lembut yang di gunakan, kekerasan juga ikut mewarnai tindakan China lewat aksi militernya. Rakyat Tibet di tembak, dipukuli hingga tewas, dibakar hidup-hidup, ditenggelamkan, dibedah, dicekik, digantung, dan dipenggal. Rakyat Tibet dibunuh, tanpa pemeriksaan, karena dicurigai menentang komunisme atau bahkan

tanpa alasan sama sekali. Alasan umum yang paling mendasar adalah mereka tidak mau meninggalkan agama.

Masyarakat Pro-Tibet menganggap kebijakan China yang tidak adil terhadap rakyat Tibet membuat sebuah lembaga internasional menuduh pemerintah China tidak menghargai dan tidak toleran atas perbedaan budaya. Pemerintah pusat China telah menanamkan ratusan miliar yuan untuk pembangunan Tibet yang hanya dinikmati oleh para imigran Han. Hal inilah yang memunculkan anggapan terjadinya kesenjangan sosial antara penduduk lokal dan para pendatang. Sasaran lain dari perlawanan rakyat Tibet ini selain tentara dan polisi yang dituduh sebagai alat penjajah, juga para imigran Han. Menghadapi kerusuhan ini, Pemerintah China tidak segan menggunakan kekuatan militer serta menuduh Dalai Lama dan para pendukungnya berusaha untuk merusak citra internasional China.

Menurut penulis, konflik internal yang dialami China dan Tibet dapat diselesaikan apabila kedua belah pihak mau bernegosiasi dan mengatakan keinginan masing-masing pihak. Keterbukaan dari Pemerintah China adalah salah satu pemicu agar tidak ada kesalahpahaman dari pihak atau rakyat Tibet, karena sebagai pihak yang dirugikan rakyat Tibet akan mudah mempercayai propaganda dari pihak lain. China bila berkeinginan untuk membuat rakyat Tibet dan wilayahnya menjadi bagian darinya, sebaiknya China memberikan hak otonomi terhadap Tibet, serta menghormati budaya dan agama Tibet serta menggunakan peace diplomacy.

Persamaan jurnal ini dengan yang akan saya tulis ada pada tindakan represif pemerintah pusat China yang melakukan segala macam upaya untuk membuat Tibet sebagai negara yang masuk pada bagian mereka secara kedaulatan penuh yang mengakibatkan rakyat Tibet yang pro-demokrasi memberikan perlawanan karena merasa adanya kesenjangan sosial yang Pemerintah Beijing lakukan terhadap etnis Han yang ada di Tibet dengan penduduk asli Tibet itu sendiri. Sehingga memicu konflik penindasan terhadap etnis Han yang dilakukan oleh penduduk asli Tibet. Sedangkan perbedaan jurnal ini terfokusnya saya sebagai

penulis terhadap sikap Amerika Serikat yang mengecam tindakan represif pemerintah China terhadap penduduk Tibet asli.

Didalam Tinjauan Pustaka yang kedua, Penulis (Maya hastuti, 2011, dengan judul opsi jalan tengah dalai lama dalam penyelesaian konflik China-Tibet).

Jurnal ini menjelaskan tentang Dalai Lama 14 sebagai pemimpin spiritual dan pemerintahan Tibet di kenal dengan nama Tenzin Gyatso. Ia adalah seorang Budhis yang sederhana, berasal dari Amdo suatu daerah di Timur laut Tibet. Ia terlahot sebagai anak petani miskin di Tibet.

Tenzin Gyatso terpilih menjadi pemimpin spiritual dan pemerintahan Tibet karena ia dianggap sebagai penerus Dalai Lama sebelumnya yang ditentukan berdasarkan sistem tradisional Tibet yang unik dalam memilih pemimpin mereka. Dalai Lama 14 terpilih sejak dia umur 4 tahun, namun di umur ke 15 dalai lama ke 14 dinyatakan sebagai seseorang guru spiritual dan keistimewaan Tibet disaat invasi Cina terjadi.

Adanya konflik antara China dan Tibet membuat Dalai Lama harus pergi dari Tibet dan berada di pengasingan. Dalam menyelesaikan konflik ini Dalai Lama menawarkan pada China Opsi JalanTengah. Opsi Jalan tengah ini muncul dikarenakan sosok Dalai Lama 14 yang anti kekerasan dan mencintai perdamaian. Karakter ini terbentuk dari proses tak sadar dari kehidupan Dalai Lama 14. Mengikuti model analisi Freud, yang menekankan bahwa karakter, dan perilaku seseorang/individu terbentuk pada tahap Unconscious seseorang. Apabila di adaptasikan dalam penulisan ini alasan Dalai Lama mengambil opsi jalan tengah sebagi upaya penyelesaian konflik China Tibet di karenakan sisi humanis dan sifat cinta damai Dalai Lama.

Seorang pemuka agama yang sekaligus menjadi kepala pemerintahan dalam memerintah akan lebih bersifat menasehati daripada bertindak jelas dan tegas. Dalai Lama sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan melihat Opsi jalan tengah adalah sebuah solusi yang real jika disesuaikan dengan kondisi yang ada baik di China maupun di Tibet.

Sebagai tokoh spiritual solusi jalan tengah diambil berdasarkan ajaran budha yaitu sifat saling ketergantungan satu sama lain yang sama-sama memberikan keuntungan.

Didalam jurnal ini penulis memfokuskan di sisi Sosok keistimewaan Dalai Lama 14 sebagai pemimpin spiritual Tibet yang kental dengan sisi spiritualnya sekaligus pemimpin Tibet yang memunculkan opsi jalan tengah dalam konflik Tibet – Tiongkok.

Persamaan jurnal ini dengan isu yang saya tulis ada pada sosok seseorang Dalai Lama sebagai pemimpin Tibet dalam kontribusinya menyelesaikan dengan cara menenangkan rakyatnya untuk menghilangkan sisi kekerasan yang semakin anarkis di seluruh penjuru negeri Tibet akibat konflik yang berkepanjangan dengan pemerintah China. Sedangkan sisi perbedaan jurnal ini dengan yang saya tulis lebih memfokuskan terhadap sosok pihak eksternal dalam hal ini Amerika Serikat yang mendukung Dalai Lama serta membantu mendesak pemerintah China untuk mau bertemu dan berdialog.

I.5 Kerangka Pemikiran

I.5.1 Teori *English School* Solidaritas

English School pertama kali muncul pada tahun 1970-an, sebagai hasil dari proyek tulisan sekelompok penulis-penulis kritis asal Inggris yang menggunakan masyarakat internasional sebagai objek utama dalam pembahasannya. Para pencetus dari *English School* ini sendiri diantaranya adalah Hedley Bull, Martin Wight, dan Adam Watson (Dunne, 2007:128).

Hedley Bull adalah staf di Departemen Hubungan Internasional pada salah satu sekolah ekonomi di London. Ide yang tercetus oleh Bull ini adalah bentuk respon dari ketidakpuasan Bull dengan apa yang telah ditawarkan oleh perspektif realisme, dan idealisme dalam melihat hubungan internasional. Bull menginginkan adanya analisis baru dalam mengkaji hubungan internasional yang telah mengalami banyak perubahan pada pertengahan abad 20 tersebut (Dunne, 2007:129). Sebagai perspektif yang baru, *English School* perlu proses dalam mendapatkan posisi penting atas pemikirannya di dalam Hubungan Internasional.

Kemudian barulah pada tahun 1990-an, *English School* mulai menjadi salah satu cabang penting dalam politik internasional meskipun lingkungan pengaruhnya masih hanya di sekitar kawasan Inggris dan beberapa universitas yang mempelajari Hubungan Internasional.

English School mengusulkan sebuah pandangan baru pada Hubungan Internasional yang menggabungkan teori dan sejarah, moralitas dan power, agen dan struktur (Dunne, 2007:128). Ini merupakan analisis konsep baru dalam melihat bagaimana politik dunia dimengerti dalam dinamika ketergantungan dari sistem, masyarakat, dan juga komunitas internasional. *English School* memandang bahwasanya kerangka umum dari Hubungan Internasional itu adalah sistem politik global yang berarti posisi dari negara, institusi, NGOs, TNCs, dan individu juga dikaji didalamnya. Jika realisme menekankan pada sistem internasional, dan liberalisme pada masyarakat dunia, *English School* mengambil fokus ditengah-tengah kedua perspektif besar tersebut, yaitu masyarakat internasional (Dunne, 2007:133). Hal ini didasarkan pada kapabilitas negara yang dapat membentuk masyarakat internasional itu sendiri. Dari satu hal mendasar ini, dapat mulai terlihat jelas bagaimana *English School* membedakan dirinya dari perspektif-perspektif sebelumnya.

English School merupakan perspektif yang menarik dari studi Hubungan Internasional. Karena, *English School* menginginkan semua negara memiliki kedaulatan yang sama, sederajat tanpa adanya pemerintahan dunia diatas negara-negara berdaulat atau disebut anarki. Tetapi bagi *English School*, perdamaian dunia dapat dicapai bila tiap-tiap negara memiliki kesadaran untuk mematuhi segala aturan yang diatur di negaranya masing-masing. Dengan demikian, *English School* juga tidak dapat menghiraukan hirarki. Inti pendekatan *English School* adalah negara-negara dianggap sebagai organisasi manusia (Jackson & Sorensen, 2009:185).

1.5.2 Teori Intervensi

Kekuatan militer suatu negara merupakan salah satu tolak ukur kekuatan negara mereka. Negara-negara yang memiliki kekuatan militer cukup besar akan disegani. Militer sarat dengan aksi kekerasan (*violent action*), namun dalam

interaksinya ada pula yang dikenal sebagai aksi tanpa kekerasan (*nonviolent action*). Kutipan itu menjelaskan bahwa *nonviolent intervention* berbeda dengan bentuk protes maupun sifat persuasif. Meskipun demikian, *nonviolent intervention* dapat memberikan dampak positif bagi yang sesuai untuk kemudian menciptakan politik baru. Sebaliknya memberikan dampak negatif bagi yang bertolak belakang sehingga dapat mengganggu bahkan menghancurkan politik yang ada. Selanjutnya ia menambahkan, dibandingkan dengan metode kelas protes dan persuasi dan non-kooperasi, metode intervensi tanpa kekerasan menimbulkan efek secara langsung.

Istilah intervensi mempunyai batasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain. Intervensi kemudian dipahami secara lebih luas, melingkupi tindakan protes suatu negara terhadap tindakan negara lain. Kebanyakan protes pada tingkat negara berupa pernyataan kenegaraan dari representatif negara tersebut. Lebih nyata lagi, lebih sering negara menjadikannya sebagai politik luar negeri yang terfokus untuk satu negara saja. Hal ini terjadi karena suatu negara menganggap perilaku negara lain dapat mempengaruhi negaranya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun intervensi dispesifikan menjadi beberapa macam, bergantung pada alasan atau tujuan dari intervensi tersebut. Salah satunya adalah intervensi kemanusiaan (*human intervention*).

Melalui definisi ini dijelaskan bahwa intervensi kemanusiaan adalah perlakuan oleh suatu negara terhadap masalah dalam negeri suatu negara lain tanpa izin dari negara tersebut dengan alasan HAM yang dimiliki oleh tiap individu. Ada kemungkinan bahwa intervensi jenis ini yang dipilih AS saat berusaha mencampuri masalah Tibet. Intervensi kemanusiaan terkesan lebih menunjukkan kepedulian terhadap HAM. Inilah yang dapat menjadikan tanggapan China ke AS lebih buruk.

Lalu secara umum intervensi merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan suatu negara kepada negara lain, baik pada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun bidang kemasyarakatan lainnya.

I.5.3 Konsep HAM

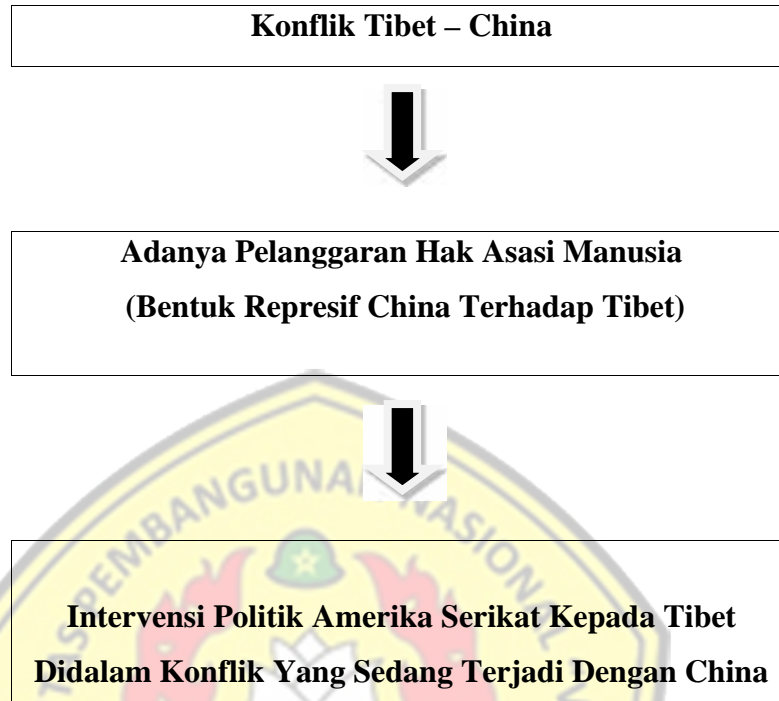
HAM merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia dan tanpa adanya HAM manusia belum bisa dikatakan sebagai manusia. HAM adalah landasan dari kebebasan, keadilan, kedamaian HAM mencakup semua dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Disamping itu definisi HAM dari *Collegiate Dictionary* oleh Merriam Webster, di edisi ke 11, memberikan definisi tentang HAM, "*Right (as freedom from unlawful imprisonment, torture, and execution) regarded as belonging fundamentally to all persons*". Selain itu definisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain dari *College Dictionary* oleh Webster didalam edisi keempat mengatakan HAM didefinisikan sebagai "*right as the right to organize politically or worship freely, thought of as belonging inherently to each human government action*".

Berbeda dari pandangan definisi-definisi mengenai HAM di atas, menurut pemerintah China penerapan prinsip HAM barat yang lebih banyak mementingkan hak-hak individu sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan stabilitas pembangunan ekonomi China. Pemerintah China lebih berkonsentrasi untuk memberikan hak-hak ekonomi terlebih dahulu Karena masih banyak rakyat China yang didera kemiskinan dan buta huruf oleh sebab itu pemerintah China lebih mementingkan hak ekonomi dari pada hak sipil dan politik yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada hak-hak individu seperti yang dinyatakan oleh presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jia bao bahwa mereka menganggap serius masalah hak asasi manusia. Akan tetapi menurut mereka kebebasan politik tidak masuk dalam hak asasi manusia, tetapi kebebasan ekonomilah yang penting untuk diwujudkan.

I.6 Alur Pemikiran

I.6.1



I.7 Asumsi

Berdasarkan data – data yang penulis temukan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis berasumsi sebagai berikut :

I.7.1 Pemerintah China di Beijing menganggap serius isu Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tibet sebagai kasus permasalahan internal bukan untuk di internasionalisasikan.

I.7.2 Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat didalam konflik ini yang datang dengan frame Demokrasi Barat disambut baik dengan keinginan dari rakyat Tibet itu sendiri.

I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis merupakan fenomena sosial dan dinamis sehingga dibutuhkan suatu proses penyelidikan penelitian jenis kualitatif. Selain itu tujuan penulis mengambil pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang konflik yang terjadi di Tibet dan bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan Amerika Serikat didalam konflik antara Tibet – RRC/Tiongkok.

I.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu akan memberikan gambaran dan penjelasan secara cermat mengenai keadaan dan gejala yang terjadi, sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih mendalam mengenai konflik yang terjadi di Tibet dan bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan Amerika Serikat didalam konflik antara Tibet – China di tahun 2012 – 2015.

I.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam menganalisa permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Untuk mempersempit wilayah penelitian, penulis membatasi karya tulis ini dari tahun 2012 – 2015 (masa pemerintahan Presiden Barack Obama), yang difokuskan pada intervensi politik yang dilakukan AS terhadap pemerintahan China dalam kasus HAM di Tibet. Yang dimaksud dengan intervensi politik adalah sebuah desakan yang dilakukan suatu Negara melalui sebuah kebijakan atau statement tanpa adanya campur tangan Militer didalamnya dikuatkan dengan intervensi humanitarian adalah perlakuan oleh suatu negara terhadap masalah dalam negeri suatu negara lain tanpa izin dari negara tersebut dengan alasan HAM yang dimiliki oleh tiap individusedangkan hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat yang melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati

keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Namun adakalanya untuk menunjang dan terjalannya kesatuan penelitian yang utuh, akan diselipkan tema sejarah dalam pembahasan nanti.

I.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing nantinya dapat menjelaskan secara jelas dan sangat terkait dengan bab-bab selanjutnya.

I.9.1 BAB I : PENDAHULUAN

berisi tentang berbagai macam penjelasan tentang pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, serta jawaban sementara (hipotesis).

I.9.2 BAB II : KONFLIK TIBET – CHINA

Mencari tahu tindakan represif China didalam konflik yang terjadi.

I.9.3 BAB III : BENTUK INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DIDALAM KONFLIK TIBET – CHINA

Mencari tahu bagaimana bentuk intervensi AS dalam konflik pelanggaran HAM di Tibet.

I.9.4 BAB IV : KESIMPULAN

Merupakan hasil akhir dari skripsi ini.